

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN MODERNISASI KOREA SELATAN PADA ERA**

##### **PARK CHUNG HEE**

Park Chung Hee merupakan salah satu presiden Korea Selatan yang berhasil meletakkan pondasi-pondasi kuat bagi perkembangan perekonomian Korea Selatan. Walaupun Park tidak berhasil menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang demokratis seperti yang Amerika Serikat inginkan, akan tetapi Park berhasil mengembangkan perekonomian Korea Selatan. Berawal dari menjadi salah satu negara termiskin di dunia, hingga dewasa ini Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara maju dengan banyak keunggulan terutama di bidang industri nya. Kesuksesan yang diterima oleh Korea Selatan pada era ini bukan lain adalah karena terciptanya dasar yang kuat. Dibalik dasar-dasar kuat tersebut, muncullah seorang tokoh yaitu Park Chung Hee.

#### **1. Keadaan Awal Korea Selatan pada Awal Kekuasaan Park Chung Hee**

Sebelum Park Chung Hee menjadi presiden Korea Selatan, ada beberapa kondisi negara yang terbagi menjadi dua fase menurut Hamilton. Dua fase ini menggambarkan kondisi negara pada saat itu, sebagai *background* yang harus dihadapi oleh presiden yang akan menjabat, yaitu presiden Park Chung Hee.

Kedua fase tersebut adalah:

1. Fase peralihan modal pertanian menjadi modal perdagangan pada tahun 1950an.
2. Fase peralihan modal perdagangan menjadi modal industrial pada tahun 1960an.

Fase pertama dimulai dengan dilaksanakannya pembagian tanah secara besar-besaran kepada petani penggarap. Akan tetapi para petani hanya diperbolehkan memiliki tidak lebih dari tiga hektar tanah. Hal ini menyebabkan presentasi pemilik tanah meningkat tajam pada tahun 1945 hingga 1965. Kenaikan berkisar antara 14% hingga 70%. Sedangkan jumlah buruh tani menjadi menurun, dari 49% menjadi 7% saja (A. Budiman 1991).

Keadaan mulai berbalik saat disahkannya UU mengenai *Land Reform*. UU *Land Reform* ini membuat para tuan tanah yang tanahnya harus diambil oleh pemerintah akan mendapatkan imbalan berupa saham negara atau pun saham dari industri-industri yang disita dari Jepang. Urusan saham ini pun dirasa cukup rumit sehingga sebelum pemerintah menyita tanah yang dikuasai negara tersebut, para tuan tanah lebih memilih untuk menjual tanahnya kepada para petani penggarapnya dengan harga yang sangat murah. Harga tanah tersebut berkisar antara 30% hingga 70% dari harga yang sebenarnya.

Hal ini juga menyebabkan kegiatan di sektor pertanian menjadi kurang diuntungkan dibandingkan dengan sektor perdagangan. Sehingga modal dari sektor pertanian ini pun beralih ke sektor perdagangan. Kegiatan mengimpor

barang dari luar negeri menjadi kegiatan perdagangan yang sangat menguntungkan pada saat itu. Terutama dikarenakan bantuan dari Amerika Serikat yang menyebabkan devisa yang diperoleh negara sangat murah sehingga barang impor yang dijual akan memberikan keuntungan yang sangat banyak kepada para importirnya.

Disamping kegiatan perdagangan yang tengah meningkat, proses industrialisasi juga mulai berkembang beriringan dengan meningkatnya sektor perdagangan pada saat itu. Industri substitusi impor menjadi industri yang lebih marak terjadi. Industri tersebut merupakan kelanjutan dari industri yang ditinggalkan oleh Jepang, disamping industri oleh warga Korea Selatan sendiri memang sudah tumbuh pada waktu penjajahan Jepang tersebut. Pada tahun 1953 hingga 1961 pertumbuhan sektor industri per tahun rata-rata mencapai 12,2%. Industri ini lebih berfokus pada bidang tekstil, penggilingan tepung dan gula. Pemerintah pada saat itu pun telah mengadakan sistem tarif serta adanya nilai tukar yang berbed bagi mata uang asing demi keuntungan kaum industriawan (A. Budiman 1991).

Disinilah para *chaebol* mulai mendapatkan modalnya. *Chaebol* yang merupakan konglomerat industri yang berbasis keluarga pada awalnya adalah para pedagang yang dekat dengan para elit negara, sehingga memperoleh lisensi-lisensi impor yang sangat menguntungkan. Pada akhir tahun 1950an, semakin jelas bahwa perekonomian sangat tergantung pada kegiatan impor. Pada saat itu bahkan nilai impor adalah 10 kali nilai ekspor. Hal ini pun juga masih bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Saat

bantuan tersebut dikurangi pada tahun 1958 hingga 1960, pemerintahan Syngman Rhee pun menjadi dampaknya dan tergulingkan.

## **2. Gerakan Awal saat Park Chung Hee Baru Menjabat**

Masuk pada fase kedua, dikarenakan negara yang terus bergantung pada kegiatan impor maka masuk pada tahun 1960an, Park Chung Hee ingin mengubah fokus perdagangan kepada industrialisasi. Dengan *background* yang telah disebutkan, Park Chung Hee memulai dengan melakukan tindakan-tindakan terutama terhadap para pejabat yang melakukan tindak korupsi. Termasuk pula dengan para pengusaha besar yang menjadi kaya dikarenakan melakukan hubungan yang ‘cukup dekat’ dengan para pejabat negara. Namun, kebijakan yang cukup unik pun muncul. Para pengusaha tidak akan dituntut ke pengadilan jika mereka setuju menggunakan kekayaannya untuk membangun pabrik-pabrik dan memberikannya kepada negara (A. Budiman 1991).

Disinilah mulai terjadi perubahan peralihan modal. Yang pada awalnya modal lebih condong kepada para pedagang, semenjak Park Chung Hee menjabat, modal beralih kepada industriawan. Jika pada masa sebelum Park Chung Hee menjabat, lisensi impor diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan pejabat negara. Berbeda dengan saat awal Park Chun Hee menjabat, lisensi tersebut diberikan kepada industriawan-industriawan yang bisa melakukan ekspor. Sehingga keuntungan berlimpah dari kegiatan impor kini beralih dari kantong para pedagang kepada kantong para industriawan yang berhasil melakukan ekspor. Dengan demikian, industri substitusi impor semakin menguat, dan impor dapat dibatasi.

Ditambah lagi dengan dilaksanakannya kebijakan moneter yang mengakibatkan barang-barang impor, terutama barang-barang lux menjadi mahal sekali. Bahkan, Korea Selatan pernah melarang para warganya mengisap rokok luar negeri agar industri rokok dalam negeri bisa tumbuh. Sementara itu, disamping kegiatan ekspor terus digalakkan, pada jaman pemerintahan Park, pada tahun 1966 UU mengenai penanaman modal asing pun dikeluarkan. UU tersebut berisikan bahwa usaha mereka akan disetujui hanya kalau usaha tersebut menunjang kegiatan ekspor atau membantu perkembangan industri dasar.

Dengan begitu, Park telah berhasil membuat peralihan modal dari kegiatan ekonomi perdagangan yang tergantung pada usaha impor dan bantuan asing, menjadi kegiatan ekonomi industri yang diarahkan kepada ekspor. Walaupun dibawah pemerintahan yang otoriter, Park berhasil menumbuhkan kelas industriawan yang tangguh. Praktik tindak korupsi pun berhasil dihentikan (A. Budiman 1991). Park juga dianggap telah berhasil membangun pondasi bagi Korea Selatan supaya tetap konsisten, sehingga memungkinkan untuk mengadakan modernisasi di segala sektor. "*Miracle of Korea*" merupakan salah satu buah karya dari arsitek pembangunan bertangan dingin, yaitu Park Chung Hee. Naiknya Park Chung Hee sebagai presiden negara Ginseng tersebut merupakan jawaban dari kesengsaraan rakyat Korea Selatan yang hidup di bawah bayang-bayang bantuan asing yang bersifat sementara (Makdori, Pembangunan Ekonomi Rezim Park Chung Hee di Korea Selatan 2015).

Di sisi lain, kemajuan perekonomian yang dicapai pada era Park Chung Hee ini pun terjadi dikarenakan Presiden Park menerapkan doktrin politik. Doktrin politik yang diterapkan disini adalah bermaksud sebagai suatu strategi pembangunan yang menekankan pada peran pemerintah yang sangat besar dalam aktifitas perekonomian dan mobilisasi berbagai segmen dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi. Pada masa pemerintahan tersebut, kebijakan otoriter dan represif dapat menciptakan stabilitas politik domestik yang berpengaruh pula pada perkembangan pembangunan perekonomian Korea Selatan (Puimara 2008). Pemerintahan pada era Park Chung Hee bertumpu pada kekuatan yang berasal dari militer, birokrat dan teknokrat. Oleh karena itu, rezim Korea Selatan di bawah Presiden Park disebut Rezim Otoriter Birokratis (Darini 2009).

### **3. Program Economic Planning Board (EPB) serta Rencana Pembangunan Lima Tahun (Five Years Economic Development Plan)**

Program-program kerja yang telah Park Chung Hee terapkan pada Korea Selatan pun berdampak baik bagi negara. Sesuai dengan fokusnya, Presiden Park pun fokus pada perkembangan industri Korea Selatan pada implementasi program kerjanya. Yang pertama adalah *Economic Planning Board* (EPB). EPB telah dibentuk pada bulan Juni 1961. EPB ini sendiri adalah badan yang dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan dengan mengarahkan serta menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi. Baik investasi dalam bentuk modal, produksi, dan juga ekspor.

Beberapa kementerian dalam pemerintahan berada dalam pengawasan EPB. Kementerian-kementerian tersebut antara lain adalah kementerian perdagangan dan industri, kementerian keuangan, kementerian bangunan, kementerian transportasi, kementerian komunikasi, serta kementerian pertanian dan perikanan. Seluruh perencanaan, penentuan anggaran dan pelaksanaan rencana-rencana yang dilakukan oleh kementerian-kementerian tersebut berada di bawah pengawasan EPB (Darini 2009). EPB juga mencanangkan target-target untuk semua variabel ekonomi terpenting. Variabel ekonomi tersebut yaitu investasi, konsumsi, tabungan, tingkatan-tingkatan output, impor dan ekspor serta alokasi-alokasi terinci oleh sektor-sektor industri. Wewenang yang dimiliki EPB bersama dengan kementerian-kementerian antara lain mengubah pajak, tarif, subsidi, tarif keperluan-keperluan umum, mengontrol harga barang-barang tertentu, dan mengubah lisensi-lisensi impor, lisensi-lisensi investasi, penggunaan devisa, dan lisensi-lisensi pendirian usaha baru tanpa membutuhkan persetujuan Majelis Nasional (Makdori 2015).

EPB diketuai oleh Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) (*Five Years Economic Development Plan*). Program Repelita ini adalah program untuk masa panjang. Program Repelita ini disusun dalam empat tahap dimulai dari tahun 1962 dengan berbagai macam tujuan tiap tahapnya.

**Tabel 3.1**

Five years plans of South Korea During Era Park Chung Hee (Muhammad 2012):

Year	Five Year Plan
1962-1966	The goal was to build a self-reliant industrial structure.
1967-1971	The goal was to modernize the industrial structure and to build import substitution industries.
1972-1976	The goal was to build an export-oriented industrial structure by promoting heavy and chemical industries.
1977-1981	The goal was to promote development of industries that can effectively compete internationally in industrial export markets.

Program Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama (Repelita I) adalah pada tahun 1962 hingga 1966. Tahap Repelita pertama dan kedua lebih diarahkan pada pembangunan industri (Makdori 2015). Hanya saja pada Repelita I ini lebih berfokus pada pembangunan struktur industri untuk kemandirian bangsa (Pohan 2014). Pada Repelita tahap pertama ini mulai diberlakukan ekonomi campuran yang dibatasi dengan konsep kapitalisme terpimpin. Konsep tersebut meperkenankan prinsip kebebasan berusaha dan berinisiatif. Pemerintah secara langsung maupun tidak langsung pun memberikan petunjuk kepada kelompok atau institusi yang tengah berusaha. Perubahan kebijakan pun terjadi pada di tengah-tengah perjalanan program Repelita pertama ini. Pada tahun 1964, pemerintah Park merubah kebijakan orientasi perekonomian. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk lebih mengenalkan produk-produk dalam negeri Korea Selatan kepada dunia internasional. Sehingga orientasi perekonomian pun diubah dari *Import-*

*Substitution-Industry* menjadi *Export-Oriented-Industry*. Manufaktur ringan menjadi produk pertama yang dipromosikan pada saat itu. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk promosi produk yang dilakukan Korea Selatan kepada dunia internasional (Puimara 2008).

Repelita yang kedua (Repelita II) yaitu pada tahun 1967 sampai 1971. Hampir sama dengan Repelita yang pertama, tahap ini masih berfokus pada pengarahan untuk pembangunan industri (Makdori 2015). Hanya saja pada Repelita II ini lebih berfokus pada modernisasi landasan industri dan pembangunan industri pengganti impor (Pohan 2014). Oleh karena itu pada tahap kedua ini, hal tersebut direalisasikan dengan cara memperbesar peranan swasta dan peran pemerintah semakin diperkecil. Pada Repelita II ini terjadi transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Hal ini dikarenakan struktur ekonomi yang mulai berubah. Selain itu perubahan jumlah penduduk yang berpindah mata pencaharian, dari sektor agraris ke sektor industri juga menjadi alasan mengapa transisi ini dapat terjadi. Pada Repelita II, investasi rata-rata mengalami peningkatan dari Repelita sebelumnya. Investasi rata-rata 20% dari GNP selama Repelita I menjadi lebih dari 30% pada Repelita II (Puimara 2008).

Dilanjutkan dengan Repelita III pada tahun 1972 hingga 1976. Tujuan yang ingin dicapai pada Repelita III ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian (Makdori 2015). Oleh karena itu pada Repelita III ini hal tersebut direalisasikan dengan cara membangun struktur industri yang berorientasikan ekspor dengan cara

mempromosikan industri berat dan kimia (Muhammad 2012). Pada era Repelita III ini terdapat pula beberapa fenomena. Munculnya *Bearucratic-autoritarian* yang disebabkan oleh dikeluarkannya konstitusi Yushin pada 1972 (Puimara 2008). Konstitusi Yoshin berisikan bahwa presiden pada saat itu yaitu Park Chung Hee yang menguasai administrasi, legislatif dan yudikatif sudah menyediakan landasan bagi periode kepemimpinan yang panjang (KBS World Radio 2015). Dengan begitu, Konstitusi Yushin tersebut semakin memperkokoh pemerinth untuk memimpin negara dengan otoriter dan lebih birokratis. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga memasuki Repelita IV (Puimara 2008).

Repelita IV berlangsung pada 1977 hingga 1981. Tujuan dari Repelita IV adalah pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil pembangunan (Makdori 2015). Hal tersebut direalisasikan dengan cara mempromosikan perkembangan industri Korea Selatan yang secara efektif dapat bersaing di kancah Internasional pada hal pasar industri ekspor (Muhammad 2012). Pada Repelita IV ini, terjadi pula pergeseran sektor industri. Dari industri ringan ke industri berat. Pergeseran tersebut menandakan bahwa perkembangan industri pada pemerintah Park Chung Hee cukup pesat. Industri ringan telah berhasil menyokong usaha pemerintah untuk mengembangkan ke arah industri berat. Presentasi perkembangan industri tersebut adalah 51,4% dari seluruh industri di tahun 1978. Perkembangan tersebut terus meningkat pada 1980 dimana presentasi perkembangan meningkat menjadi 55,4% (Puimara 2008).

Pelaksanaan Repelita tersebut memakan waktu lebih dari tiga dekade. Pertumbuhan Korea Selatan pun beriringan dengan berjalannya waktu tersebut. Dampak tersebut sangat dirasakan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung sekitar tahun 1998. Pada masa pemerintahan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 8,6% dan menjadi negara dagang terbesar ke sebelas di dunia. Dalam kurun waktu kurang dari dua generasi, Korea Selatan mampu menjadi salah satu negara termaju di dunia pada bidang perkapalan, perpabrikasi, elektronika, semi konduktor dan mobil (Puimara 2008). Hal tersebut tercapai bukan lain karena dasar yang kuat, salah satunya dengan program Repelita tersebut. Berikut data terkait peningkatan beberapa sektor oleh program Repelita, dimulai dari Repelita I hingga Repelita III:

**Tabel 3.2**  
Indikator-indikator Ekonomi Penting di Sektor Industri  
(prosentasi)

Tahun	Sektor			
	Pertanian	Tambang& Manufaktur	Jasa	Prosentasi Ekspor Manufaktur
<b>Repelita I</b>				
1962	36,6	14,3	47,1	27,0
1966	34,4	18,4	45,4	62,4
<b>Repelita II</b>				
1967	30,1	18,8	49,3	70,1
1971	27,0	21,0	50,6	86,0
<b>Repelita III</b>				
1972	26,4	22,2	50,2	87,0
1976	23,8	27,0	48,6	89,8

Sumber: Biro Perencana Ekonomi, 1980 (A. Budiman 1991)

#### 4. Kebijakan Export-Oriented Industrialization (EOI)

Selain Repelita, masih ada beberapa program lain yang mengawali keberhasilan negara Ginseng tersebut. Masih dalam rangka meningkatkan basis ekonomi negara ke orientasi ekspor untuk mendulang devisa sebanyak mungkin, presiden Park mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu kebijakan *Export-Oriented Industrialization* (EOI). Industri di Korea ini sendiri telah mengalami cukup banyak pasang surut, dimulai dari jaman penjajahan Jepang.

Beberapa warisan Jepang juga menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat Korea. Warisan tersebut berupa sarana-sarana infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, listrik, saluran irigrasi, tenaga terdidik dalam industri dan manajemen, serta sejumlah pabrik yang mampu menyediakan suatu basis industri ringan meskipun dalam jumlah dan kekuatan terbatas. Dengan begitu, Korea Selatan khususnya, sudah memiliki basis sosial dan ekonomi yang cukup kuat dan memadai untuk memulai kembali program-program industrialisasi substitusi impornya (Darini 2009).

Pada saat pemerintahan Park Chung Hee berlangsung, pemerintahan Korea Selatan berperan aktif dalam mengarahkan sektor swasta, khususnya para *chaebol*, untuk mewujudkan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah berupa pengembangan industri manufaktur seperti elektronik, otomobil, dan semikonduktor (Makdori 2015). *Chaebol* ini sendiri merupakan organisasi konglomerat yang pada dewasa ini mendominasi perekonomian di Korea Selatan. *Chaebol* di Korea Selatan pada dasarnya sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari masa pemerintahan Syngman Rhee. Pada masa pemerintahan Rhee, para *chaebol* sudah mulai memperoleh modal, akan tetapi hal tersebut diporakporandakan oleh presiden Rhee yang terbukti melakukan tindak korupsi (Darini 2009).

Seakan memahami betul konsep ekonomi modern, presiden Park akhirnya mendukung kegiatan para *chaebol*. Sebagian produk industri yang didukung oleh pemerintah, diarahkan untuk pasaran ekspor. Hal tersebut dilakukan karena produk tersebut tidak memiliki pasaran dalam negeri. Pemerintah juga

memberikan berbagai kemudahan dalam hal perkreditan bagi para eksportir. Selain itu, pemerintah juga mengatur alokasi kredit yang disesuaikan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri dan ekonomi yang pada umumnya lebih diprioritaskan. Produk-produk industri ringan seperti tekstil dan pakaian jadi, komponen elektronik, plywood, wig, serta barang-barang perantara seperti produk-produk kimia, minyak bumi, kertas dan baja, mengalami keberhasilan ekspor pada saat itu. Hal tersebut merupakan peningkatan yang cukup pesat bagi perekonomian negara serta menjadi kejadian kali pertama bagi negara Ginseng tersebut. Kejadian tersebut berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 1964 hingga 1974 (Makdori 2015). Berikut adalah tabel komoditi ekspor utama di Korea Selatan pada tahun 1968.

**Tabel 3.3**

Tabel Komoditi Ekspor Utama di Korea Selatan pada tahun 1968 (Puimara 2008) :

Komoditi	Ekspor (juta \$ AS)	Persen (%)
Kayu Lapis	65,6	13,1
Rambut Palsu	35,5	7,1
Garmen Pakaian Dalam	28,7	5,7
Garmen lain	26,8	5,4
Bahan Mentah Sutera	18,0	3,6
Ikan Segar	16,9	3,4
Serat Tenun	16,7	3,3

Rumput Laut Kering	13,7	2,7
Serat Tenun Kapas	13,3	2,7
Biji Tungsten	11,1	2,2
Lain-lain	254,1	52,0
Jumlah	500,4	100,0

Selain itu, bantuan pinjaman dari luar negeri, baik dari Jepang maupun Amerika Serikat juga membantu Korea Selatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Keberhasilan teknologi dalam mendukung kegiatan yang dijalankan juga salah satu caranya adalah dengan “berguru” kepada teknologi asing termasuk pada Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya di kawasan Eropa (Puimara 2008).

##### **5. Kebijakan Heavy Chemical Industry (HCI)**

Selain kebijakan EOI, pada masa pemerintahan Park Chung Hee masih terdapat kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *Heavy Chemical Industry* (HCI). Korea Selatan mulai memasuki tahap pembangunan industri yang disebut sebagai pendalaman (*deepening process*) pada paruh kedua dasawarsa 1970-an. Pada masa tersebut juga terjadi perubahan orientasi industri yaitu industri ringan ke industri berat (Darini 2009). Sehingga pada tahun 1973, pemerintah memberikan prioritas kepada perkembangan industri berat dan kimia. Misalnya pada pembuatan kapal, industri permesinan, baja, mobil, dan petro kimia. Hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan. Yang

pertama adalah karena terdapatnya keterbatasan dalam mengekspor hasil industri ringan yang sangat tergantung pada tenaga kerja murah yang semakin sulit didapat. Yang kedua adalah, karena terjadi perubahan dalam struktur impor. Pesatnya perkembangan dalam pemakaian bahan penengah impor untuk menjadi barang ekspor juga mempengaruhi *balance of payment* (Makdori, Pembangunan Ekonomi Rezim Park Chung Hee di Korea Selatan 2015). Rencana pembangunan industri berat dan kimia merupakan usaha Korea Selatan untuk membuat kekuatan industrinya lebih mandiri.

Para *chaebol* pada masa tersebut mendapatkan dana pinjaman tanpa bunga untuk mendirikan pabrik pada kegiatan ekspor. Misalnya Hyundai, ditugasi untuk membangun sektor otomotif. Juga Daewoo yang merupakan spesialis di bidang tekstik diperintahkan untuk menangani pembuatan perkakas mesin, membuat kaban dan juga mobil. Presiden Park memaksakan pembangunan sejumlah industri dasar, di antaranya baja, dan salah satunya adalah Pohang Steel Company (POSCO) (Darini 2009).

Kebijakan ini bukan berarti tidak memiliki kesulitan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kesulitan yang menghambat, khususnya pada kesulitan eksternal. Krisis minyak dan resesi perekonomian dunia menjadi salah satu penghambat pada saat itu. Keadaan semakin diperparah, karena di dalam negeri sendiri terjadi lonjakan inflasi sehingga perkembangan ekspor Korea Selatan menjadi mulai terancam (Makdori 2015). Namun Korea Selatan masih beruntung dikarenakan sektor-sektor konstruksinya memperoleh peluang bisnis yang sangat besar terutama dengan berlangsungnya

pembangunan ekonomi di negara-negara Timur Tengah yang terkenal akan kekayaan minyaknya (Darini 2009). Kebanyakan industri di Korea Selatan juga memperoleh manfaat yang sangat besar dari alih teknologi Jepang yang mulai digalakkan kembali sejak pembukaan kembali hubungan diplomasi antara kedua negara (Makdori 2015).

## **6. Gerakan Saemaul Undong**

Disamping dua kebijakan tersebut, presiden Park juga membuat sebuah gebrakan baru melalui programnya. Program ini sangat terkenal dan bahkan beberapa negara tengah mencoba untuk mempraktekan program ini pada negaranya. Gerakan *Saemaul Undong* merupakan salah satu warisan berharga dari presiden Park bagi rakyat Korea Selatan. Gerakan ini tercetus, berawal saat Presiden Park ‘blusukan’ atau turun secara langsung ke lapangan, dimana tempat tersebut merupakan bekas lokasi banjir pada 1969 (rumahsuluh 2011). Gerakan *Saemaul Undong* ini sendiri adalah gerakan dengan konsep untuk mengembangkan dan memodernisasikan daerah pedesaan di Korea Selatan (Makdori 2015). Gerakan ini juga dapat diartikan sebagai gerakan perubahan dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Yusni 2016). Tujuan gerakan ini adalah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan (indipendence), kemandirian (self-help) untuk mewujudkan gerakan desa baru (New Village Movement), dan kerja sama atau sifat gotong royong (Mutual Cooperation) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Makdori 2015)

.Gerakan *Saemaul Undong* ini mulai digerakkan pada saat Repelita III berlangsung (Yusni 2016). Tepat nya pada tahun 1971, konsep ini mulai diperkenalkan ketika Korea Selatan menghadapi permasalahan disparitas pedesaan-perkotaan akibat prioritas pembangunan yang selalu menekankan industrialisasi berorientasi ekspor (Makdori 2015). Secara bersamaan, pada Repelita III, investasi diarahkan untuk membangun industri petrokimia berskala besar serta mengembangkan mekanisasi secara besar-besaran untuk mendukung pertanian dan aktivitas lainnya. Hal tersebut dilaksanakan, salah satunya dengan mencanangkan program pencukupan kebutuhan pangan penduduk dari produksi sendiri melalui gerakan *Saemaul Undong* (Yusni 2016).

Gerakan *Saemaul Undong* pun juga mulai digerakkan. *Saemaul Undong* dapat diartikan gerakan perubahan dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Yusni 2016). Sebutan tersebut muncul berawal dari masalah-masalah sosial yang mulai muncul dikarenakan keberhasilan pembangunan Korea Selatan yang dinilai cukup pesat. Masalah-masalah sosial tersebut contohnya seperti pembangunan yang menekankan modernisme di negara lainnya. Pada saat itu, tingkat pertumbuhan sektor pertanian tertinggal jauh dari sektor industrial. Hal itu menimbulkan adanya gap antara pendapatan rumah tangga petani dengan pendapatan masyarakat urban yang semakin besar. Akibatnya dari hal tersebut adalah meningkatnya urbanisasi pemuda desa ke wilayah urban. Pemuda desa banyak yang meninggalkan desanya tanpa kemampuan yang memadai dan menciptakan tekanan penduduk di

wilayah-wilayah urban. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kesenjangan hal tersebut, Presiden Park selaku arsitek pembangunan Korea Selatan mencanangkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Desa Baru atau Gerakan Masyarakat Baru.

Gerakan ini memiliki tujuan, antara lain sebagai pencerahan rakyat pedesaan melalui “pendidikan masyarakat baru” untuk mengubah bentuk pandangan dan tingkah laku ikatan tradisional dan jeratan kemiskinan masyarakat desa. Selain itu gerakan ini juga bertujuan untuk membantu mengembangkan kerajinan dan penghematan, semangat untuk kerjasama dan menolong diri sendiri, serta memodernisasi masyarakat pedesaan (Makdori 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *self help, cooperation and diligence* menjadi tiga prinsip dasar yang melandasi gerakan ini. Masyarakat lebih diajak untuk membangun kemampuan diri sendiri dan kemandirian serta kerjasama yang baik dengan lingkungan (Yusni 2016).

Selain itu pada tahun 1973, pemerintah membuat *Village Cooperative Scheme* (VCS) dengan tujuan untuk memperluas cakupan wilayah proyek *Saemaul Undong*. Pelaksanaan dari VCS ini adalah agar sebuah desa dapat membentuk kerjasama atau sebuah unit produksi bersana dengan desa tetangga. Proyek-proyek komunitas baru dapat menghasilkan modernisasi perumahan masyarakat desa, pembangunan jalan-jalan dan saluran air, pembangunan sisten sanitas dan memberikan pengetahuan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat desa, industri di pedesaan serta fasilitas pemasaran.

Gerakan nasional ini adalah salah satu cara memelihara semangat kerjasama dan persatuan (Darini 2009).

Pelaksanaan *Saemaul Undong* dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap awal adalah “*Environment Improvement*” yaitu kegiatan perbaikan lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana dasar di pedesaan. Baik jalan, jembatan, irigrasi, drainase, maupun sarana air bersih dan sarana sanitasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemberian bantuan stimulasi berupa semen, beton, serta bahan atau perlengkapan lainnya. Tahap kedua yaitu “*Increasing Income*”. Tahap ini berisikan kegiatan yang dilakukan melalui berbagai pelatihan ekonomi produktif, perluasan akses permodalan serta fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk desa.

Tahap yang terakhir adalah “*Mental Reform*”, yaitu kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara intensif untuk membangun mentalitas penduduk desa agar memiliki etos kerja keras, tekun, jujur dan disiplin yang tinggi. Kegiatan ini diawali dengan perbaikan dan komitmen moral para pemimpin di setiap jenjang pemerintahan, kemudian di transformasikan ke seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik masyarakat maupun pelaku usaha (Yusni 2016). Selain itu, pada tahap terakhir ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja pertanian maupun non-pertanian di samping menggarap aktivitas lain yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga setempat (Makdori 2015).

Pada pelaksanaan gerakan ini, pemerintah hanya memberikan bantuan dalam bentuk semen dan bahan bangunan lainnya. Pada 1970, pemerintah mengirimkan sekitar 335 sak semen, masing-masing kepada 33.267 desa yang ada di Korea Selatan (rumahsuluh 2011). Dengan investasi pemerintah untuk semen itu sendiri hanya sekitar US\$ 10 juta pada saat itu (Yusni 2016).

Akan tetapi, gerakan ini berhasil meraih banyak pencapaian. Berikut data terkait pencapaian yang telah diraih warga Korea Selatan dengan Gerakan *Saemaul Undong* ini hingga tahun 1970.

**Tabel 3.4**

Major achievements of some Saemaul Undong projects in the 1970s

(Sooyoung 2009):

<i>Project</i>	<i>Unit</i>	<i>Target</i>	<i>Performance</i>	<i>Ratio (percentage)</i>
Village roads expansion	Km	26 266	43 558	166
Farm feeder roads construction	Km	49 167	61 797	126
Small bridge construction	Ea	76 749	79 516	104
Small reservoirs construction	Ea	10 122	10 742	106
Traditional small irrigation (channel)	Ea	22 787	28 352	124
Traditional small irrigation (raceway)	Km	4 043	4 442	109
Traditional small irrigation (embankment)	Km	17 239	9 180	53
Village centre construction	Ea	35 608	37 012	104
Public warehouse construction	Ea	34 665	22 143	64
Housing improvement	Ea	544 000	225 000	42
Village layout renovation	Ea	-	2 747	-
Sewage system upgrade/construction	Km	8 654	15 559	179
Electricity supply system installation	Household	2 834 000	2 777 500	98

Selain itu, gerakan ini berhasil menciptakan pembangunan 43.631km jalan selama tahun 1971 hingga 1978. Serta 70.000 jembatan serta memperbaiki 24.000 sumber air minum. Pendapatan per kapita penduduk Korea Selatan juga meningkat tajam. Dari US\$1.025 pada tahun 1971, menjadi US\$1.961 pada tahun 1977 (Yusni 2016). Sejumlah pabrik juga mulai dibangun di daerah pedesaan. Sebanyak 706 pabrik yang hampir seluruhnya mendapat insentif pemerintah berupa subsidi juga telah dibangun di daerah pedesaan. Pada kisaran tahun 1970 hingga 1979 pendapatan petani juga mengalami peningkatan sebesar 9,5% per tahun. Gerakan ini pun mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi di daerah pedesaan. Laju investasi pun mengalami peningkatan. Pada sekitar tahun 1960-an, laju investasi hanya sebesar 10%, setelah diterapkannya Gerakan *Saemaul Undong* ini pun laju investasi meningkat menjadi 20% (Makdori 2015).

Terlebih lagi, dengan partisipasi warga menyediakan tenaga kerja dan tanah, sebanyak 16.600 desa mencapai harapan lebih dari yang ditargetkan. Bahkan terdapat 6000 desa mandiri yang dapat membangun desanya tanpa bantuan pemerintah (rumahsuluh 2011). Gerakan ini tidak hanya terbatas pada membangun secara bersama. Akan tetapi, gerakan ini juga telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat Korea Selatan akan potensi yang dimiliki, serta membangun mentalitas untuk bekerja keras bagi kehidupan yang lebih baik. Secara individu maupun pada suatu komunitas (Yusni 2016).

Gerakan *Saemaul Undong* ini sendiri memiliki beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Faktor utama dari

keberhasilan gerakan ini adalah keberhasilan mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang berbagai peluang yang ada di sekitarnya, baik sebagai individu maupun komunitas. Dukungan konsistensi oleh pemerintah pada berbagai lapisan, dan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat disini juga menjadi faktor lain yang menyebabkan keberhasilan gerakan ini. Keberadaan pemimpin *Saemaul* (*Saemaul Leader*) juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan gerakan ini.

Pimpinan *Saemaul* adalah orang yang ditunjuk dan diberikan pendidikan, serta latihan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memastikan keberhasilan *Saemaul Undong* ini sendiri. Pimpinan *Saemaul* juga merupakan seorang sukarelawan dan tidak digaji. Ia bekerjasama dengan kepala desa agar program *Saemaul Undong* terlaksana dengan baik. Dalam praktiknya, pemimpin *Saemaul* bertugas membujuk penduduk desa agar dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Contohnya adalah dengan mengorbankan tanahnya untuk dipakai menjadi jalan desa sebagai akibat dari pelebaran jalan desa dan juga program perbaikan atap rumah.

Presiden Park Chung Hee sebagai pemimpin negara pada saat itu merupakan salah satu penentu keberhasilan gerakan *Saemaul Undong* ini. Hal tersebut dikarenakan Park Chung Hee merupakan pemimpin dengan pendirian yang sangat teguh dan tegas, bahkan terkesan otoriter. Presiden Park juga mewajibkan kepala *Saemaul* membuat laporan perkembangan program *Saemaul Undong* yang langsung diterima di meja presiden. Presiden Park tidak segan memberi teguran jika program ini berjalan tidak sebagaimana

mestinya. Tetapi presiden Park pun juga tidak segan dalam memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil melaksanakan gerakan ini. Penghargaan tersebut dapat berupa tambahan bantuan dana untuk kegiatan *Saemaul Undong* untuk tahun berikutnya (Yusni 2016).

Menurut Presiden Park, kemajuan dapat dipercepat jika semangat warga desa untuk maju disokong atau didukung oleh pemerintah. *Saemaul Undong* menurut Presiden Park adalah kampanye pembangunan mental dan revolusi mental. Mengapa? Karena bahkan Presiden Park mendukung gerakan ini tidak dengan pidato, akan tetapi dengan tindakan dan praktik (rumahsuluh 2011). Oleh karena itu mengapa Presiden Park terkesan menjadi salah satu yang dinilai otoriter. Presiden Park sendiri berhenti memimpin gerakan ini pada tahun 1979 karena tewas tertembak pada saat itu. Akan tetapi, gerakan yang sudah ia mulai ini menjadi warisan tersendiri bagi rakyat Korea Selatan dan masih dilanjutkan di tahun-tahun kemudian, bahkan hingga tahun 1998 (Muhammad 2012).

Selain keberhasilan program-program yang telah Park Chung Hee praktikan pada Korea Selatan, beberapa hubungan kerjasama luar negeri pun terjalin pada saat era pemerintahan Presiden Park. Serta awal keaktifan Korea Selatan pada beberapa organisasi internasional dimana membawa pengaruh bagi dunia internasional, khususnya Asia, juga tercipta pada era Park Chung Hee. Disinilah citra Korea Selatan di dunia internasional juga mulai lebih dipandang dan diakui.